

Antisipasi Polri Terhadap Perkembangan Situasi Politik Dan Kamtibmas Di Timor Timur

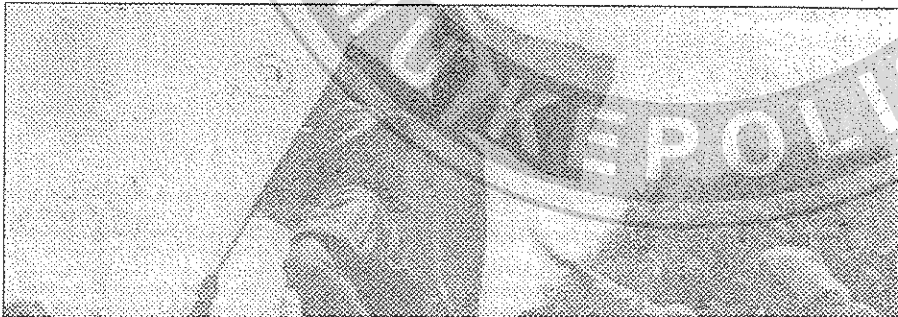
Oleh : Brigjen Pol. Drs. FX. Soemardi MA, SH.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan derasnya arus reformasi di Indonesia dampaknya membias terhadap kebijaksanaan politik luar negeri, khususnya penanganan masalah pemerintahan di Timor Timur, terutama setelah pertemuan tripartit tanggal 4 dan 5 Agustus 1998 di New

York Amerika Serikat yang pada intinya memberikan status khusus berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya bagi Timor Timur. Akibat dari perkembangan status tersebut kebijaksanaan pemerintah di bidang Hankam mengalami perubahan terutama menyangkut masalah perlakuan Daerah Operasi Militer (DOM),

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



pengurangan jumlah personil tentara (TNI-AD), dilain pihak adanya indikasi menurunnya citra ABRI (Cq. TNI-AD, terutama Kopassus) dan dampak ikutannya perlu diantisipasi oleh Polri bagi kepentingan pembinaan Kamtibmas di Timor Timur.

FAKTA-FAKTA

Pertemuan Tripartit di New York Amerika Serikat yang diselenggarakan tanggal 4 - 5 Agustus 1998 telah mencapai kesepakatan :

Pemberian status khusus berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya bagi Timor Timur.

Melibatkan rakyat Timor Timur dalam mencari penyelesaian bagi masalah Timor Timur.

Pengurangan secara bertahap jumlah pasukan ABRI dari Timor Timur.

Pembukaan interest section di ibukota negara masing-masing.

Melanjutkan pertemuan AKETD.

Penetapan waktu pembicaraan pejabat tinggi senior atau senior official meeting (SOM).

Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang bertikai yaitu kelompok GRPRTT dipimpin oleh Manuel Carascalao, Dewan Solidaritas Mahasiswa, kelompok aliran keras Fretilin dan GPK serta kelompok Clandestine yang sampai saat ini menuntut *Referendum* atau *merdeka sendiri* dan mereka menolak *Otonomi khusus* yang disepakati oleh Tripartit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Timor Timur, terdapat kelompok pemuda militan pro integrasi yang berjumlah 1.945 orang yang selama ini dibawah pembinaan Kopassus dan Satuan Tugas Intelejen (SGI) dengan beberapa keterangan :

Sudah terlaloh melaksanakan tugas bantuan tempur dan intelejen.

Sebagian dipersenjatai.

Mendapatkan honor tetap setiap bulan.

Pelaksanaan tugas sesuai pembagian wilayah namun dalam pelaksanaan tugasnya sering "*over acting*" sehingga menimbulkan antipati dan tidak disenangi masyarakat.

Terorganisir dalam beberapa kelompok :

Tim Garda Paksi :

- Jumlah = 745 orang.

- Dipersenjatai = 10 orang.

Tim Makikit : **FAKTI - DHARMA - WASPADA**

- Jumlah = 182 orang

- Sebagian dipersenjatai (Mouser, SKS, G-3).

Tim Sera :

- Jumlah = 233 orang

- Sebagian mantan GPK.

- Dipersenjatai (M-16, EKE, G-3, Mouser).

Tim Alfa :

- Jumlah = 118 orang

- Sebagian dipersenjatai (M-16,SKS, G-3).

Tim halilintar .

- Jumlah = 288 orang

Pengurangan pasukan ABRI (khususnya TNI-AD):

Gelombang I tanggal 28 Juni 1998 = 378 personil

Gelombang II tanggal 5 Agustus 1998 = 373 personil

Gelombang III tanggal 8 Agustus 1998 = 792 personil

Jumlah = 1.543 personil

Yang akan berlanjut sampai tercapai kekuatan yang ditentukan pimpinan ABRI, walaupun masih ada reaksi sinis dari kelompok anti integrasi yang tetap yakin bahwa ABRI benar-benar dikurangi.

Pelaksanaan 6 kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tripartit menghadapi berbagai kendala bagi pemerintah Republik Indonesia antara lain pelaksanaan kesepakatan tentang pemberian status khusus berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya masih mendapat tantangan dari kelompok-kelompok ekstrim di Timor Timur yang merdeka sendiri.

Selama pelaksanaan Operasi Militer di Timor Timur ternyata Kopassus melalui Satuan Tugas Intelijen (SGI) telah membentuk Gardagarda yang jumlahnya kurang lebih 1.945 orang di bagi dalam 6 tim, sudah terlatih melakukan operasi tempur dan intelijen, sebagian anggotanya dipersenjatai, melaksanakan tugas sesuai pembagian wilayah yang ditetukan.



Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Timor Timur, terdapat kelompok

pemuda militan pro integrasi yang berjumlah 1.945 orang yang selama ini dibawah pembinaan Kopassus dan Satuan Tugas Intelijen (SGI).

DISKUSI

Propinsi Timor Timur yang merupakan propinsi ke 27 di Indonesia sejak menyatakan berintegrasi dengan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 ternyata masih "menjimpan" berbagai masalah antara lain :

Sejak berintegrasi dengan Indonesia, Portugal masih terus mempersoalkannya dan melalui tokoh Ramos Horta, status propinsi Timor Timur dijadikan "bulan-bulanan" dan wahana di tingkat internasional bagi kepentingan berbagai pihak, baik perorangan maupun kelompok bahkan negara, sehingga di PBB

apalagi Polri harus berada di depan dan tuntutan reformasi yang menuntut penanganan masalah hukum dan HAM secara benar.

Kebijaksanaan Polri di depan yang harus dilaksanakan oleh Polda Timor Timur didapatkan dengan permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas menuntut pemikiran dan kebijaksanaan yang "*sepadan*" dan "*memadai*" (catatan : hampir serupa terhadap masalah di Timor Timur adalah Aceh dan Irian Jaya) dapat dikatakan "*perlu mendapat prioritas*" terutama masalah sumber daya (manusia dan logistik).

Dapat dikatakan situasi di Timor Timur menjadi "*sorotan mata dunia*" dan menjadi "*barometer*" untuk mengukur sejauh mana keseriusan pemerintah Indonesia menangani masalah Timor Timur (dan ini juga menyangkut nama baik Indonesia) yang seja dini, pada saat ini sudah harus menjadi konsep pemikiran guna meningkatkan kualitas Polda Timor Timur.

Kekuatan ABRI (khususnya militer/tentara) yang ada saat ini:

Militer organik = 9.322 orang.

Militer penugasan = 7.932 orang.

Jumlah = 17.254 orang.

(termasuk Polri 380 orang disini).

Pada gilirannya perannya harus diisi atau digantikan oleh Polri secara seimbang. Akibat dari pengurangan pasukan ABRI/militer tersebut, perluantisipasi Polri yaitu :

tibmas, untuk itu pembinaan terhadap garda-garda ini dapat berupa :

Diserahkan kepada aparat teritorial (Korem/Kodim).

Sebagian yang memenuhi syarat direkrut menjadi satpam, wiraswasta dan petani setelah melalui pelatihan.

Penambahan personil dan alat/alsus Polda Timor Timur :

Jangka pendek :

- Penambahan 2 SSK Brimob untuk ditempatkan di sektor Timur.

- Mencukupi sarana perlengkapan yang dibutuhkan.

Jangka Panjang :

Dalam rangka menghadapi otonomi khusus Timor Timur khusus untuk pengadaan personil Diktuk BA/TA agar diberikan prioritas kepada putra asli dari Timor Timur.

Dalam rangka "*memberikan perhatian*" dan kebijaksanaan yang "*sepadan*" dan "*memadai*" terutama untuk memberi motivasi dan dalam rangka pembinaan personil yang mengawaki Polda Timor Timur, maka selain memberikan prioritas penerimaan putra/putri asli daerah (persyaratannya agak diperlunak), tentunya personil lain yang bukan putra daerah juga "*diberi perhatian*" (selama ini telah dilaksanakan terutama para Kapolres yang masuk Sespim Polri ataupun lulusan Sespim Polri yang di-

pembinaan Kamtibmas :

Setelah kesepakatan tripartit tanggal 4 - 5 Agustus 1998 di New York, ternyata masih ada kelompok-kelompok anti integrasi yang menolak otonomi khusus yang seluas-luasnya tetapi menginginkan diadakan referendum atau merdeka sendiri, dan hal ini "diberi angin" oleh tokoh panutan Uskup Bello.

Perlakuan ABRI terhadap Timor Timur sebagai DOM selama kurang lebih 22 tahun ternyata meninggalkan "luka-luka yang membekas" dan sulit dihilangkan (yang sangat memalukan adalah peristiwa Santa Cruz).

Dengan ditariknya personil ABRI/militer selain perlu diisi/diganti personil Polri, (Polri di depan) ternyata terdapat beberapa Garda (satuan rakyat yang membantu militer, semacam tenaga bantuan operasional) yang perlu penanganan khusus.

Otonomi yang seluas-luasnya, Polri perlu mempersiapkan diri, terutama sumda (manusia dan logistik).

Polda Timor Timur sebagai Polda yang masih baru (ex Polwil jadi Polda akhir tahun 1997) mempunyai banyak keterbatasan, dihadapkan kepada permasalahan yang menjadi perhatian dunia diperlukan kebijaksanaan yang "sepadan" dan "memadai" terutama terhadap sumda (personil dan logistik), baik dalam rangka seleksi/rekrutmen calon personil dari putra

kan di sektor timur dan sektor barat dengan tugas :

Mengisi Pos Bimmaspol di desa tertentu untuk menggantikan posisi peran pos BTT.

Melakukan pengamanan pada rute perjalanan umum (RPU).

Pengamanan obyek vital.

Mencukupi sarana pendukung berupa alat/alsus :

Alkomlek, HT (sesuai persetujuan Kapolri pada medio tahun 1998)

Ranmor patroli (roda 4, roda 2 tril).

Ranmor pengawalan (Pam anti penghadangan).

Senpi standar ABRI bagi 1 SSK Brimob yang belum dilengkapi Senpi.

Rompi anti peluru.

Sarana Jihandak.

Perlengkapan PHH/Dalmas untuk 13 SSK.

Jangka panjang :

Untuk menghadapi otonomi khusus Timor Timur disarankan untuk pengadaan personil Diktuk BA/TA diberikan prioritas kepada putra asli daerah Timor Timur.

Penanganan Garda-garda yang ditinggalkan oleh Kopassus disarankan :

Pembinaannya diserahkan kepada aparat Teritorial (Korem/Kodim).

Sebagian yang memenuhi persyaratan direkrut menjadi :